

## Antisipasi Jatuhnya Korban DBD, Warga Diimbau Tingkatkan PHBS

**BANDUNG (IM)** - Hingga Maret 2024, tercatat delapan orang meninggal dunia akibat demam berdarah dengue (DBD). Angka tersebut menyamai kasus DBD pada periode Januari-Desember 2023.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung, Asep Gufron pun mengimbau, kepada masyarakat agar dapat mencegah DBD. Salah satu upayanya yakni dengan mengoptimalkan lingkungan yang nyaman.

"Caranya dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dengan pola ini, diyakini akan mampu menciptakan lingkungan bersih dan nyaman," kata Asep Gufron, Kamis (21/3).

Dengan menerapkan PHBS, ia percaya bahwa masyarakat akan terhindar dari DBD. Menjaga kebersi-

han lingkungan, secara tidak langsung akan meminimalisir adanya genangan air.

"Saat ini masih musim hujan. Tetapi informasi BMKG, musim hujan ini tidak akan panjang. Tetapi ini perlu diantisipasi. Karena masa transisi inilah, banyak nyamuk yang menyebabkan DBD," ucapnya.

Asep menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini tengah menerapkan teknologi wolbachia. Metode tersebut, diharapkan pihaknya dapat menekan penyebaran nyamuk aedes aegypti. "Ada dua wilayah yang melaksanakannya, yaitu di Kecamatan Ujungberung dan Kecamatan Kiaracondong. Ini upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan DBD," ujar dia. ● **pra**

## Mudik Gratis di Wilayah Bogor Hanya Dilaksanakan di Kab. Bogor

**BOGOR (IM)** - Pelayanan mudik gratis di wilayah Bogor pada tahun ini rupanya hanya dilaksanakan di Kabupaten Bogor. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menjelaskan, program mudik gratis merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenuh) dan hanya akan dilaksanakan di beberapa titik yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Bogor.

"Dari Kemenuh, tahun ini titiknya di Kabupaten Bogor," ucap Marse saat dihubungi, Kamis (21/3).

Sementara itu, untuk wilayah Kota Bogor, pihaknya memastikan tidak ada mudik gratis. Begitupun dengan program gratis melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak tersedia seperti tahun sebelumnya. "Eenggak, sama dengan tahun lalu juga tidak ada," ujarnya.

Meski begitu, Marse berharap beberapa organisasi atau pihak swasta bisa menyeleng-

garakan program mudik gratis secara mandiri. Menurut Marse, ada beberapa organisasi yang akan melaksanakan program mudik gratis di Kota Bogor. Namun, terkait hal itu pihaknya belum menerima informasi secara resmi.

"Kita lihat ada beberapa organisasi-organisasi mungkin yang melaksanakan secara mandiri. Tapi memang informasi belum masuk secara resmi ke kami (Dishub Kota Bogor)," terang Marse.

Marse juga mengatakan, Terminal Baranangsiang akan menjadi titik utama pemberangkatan angkutan Lebaran, mengingat terminal tersebut masuk kategori terminal tipe A yang melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) atau angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP).

"Terminal Baranangsiang yang akan menjadi titik utama pada saat angkutan Lebaran," tutur Marse. ● **jai**



IDN/ANTARA

### PENUKARAN UANG BARU JELANG LEBARAN DI TASIKMALAYA

Warga antri saat penukaran uang baru pada layanan kas keliling Bank Indonesia Tasikmalaya di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Kamis (21/3). KPw Bank Indonesia Tasikmalaya menyediakan layanan penukaran uang baru lebaran sebesar Rp1,97 triliun untuk wilayah Priangan Timur, Jawa Barat, dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (Serambi).

## Pilpres 2024 Usai, Pangdam Siliwangi Ajak Masyarakat Kembali Bersatu

**CIBINONG (IM)** - Menyikapi hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Panglima Kodam III Siliwangi, Mayjen Mohammad Fadjar mengajak masyarakat kembali bersatu untuk melanjutkan pembangunan.

Mayjen Mohamad Fadjar menuturkan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi kubu 01, 02 dan 03, pasca KPU-RI menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wakil Presiden dengan presentase kemenangan 58,58 persen, unggul atas raihan suara Anies-Muhaimin 24,95 persen dan Ganjar-Mahfud yang meraih suara 16,47 persen.

"Pemilu sudah usai, tidak ada lagi kubu 01, 02 dan 03. Sekarang kita bersatu lagi melanjutkan pembangunan," tuturnya kepada wartawan di Kampung Kedung Umpal, Kelurahan Keradenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (21/3).

Mayjen Mohamad Fadjar menerangkan bahwa Pilpres atau Pemilu itu sudah biasa dan siklus lima tahunan. Usai Pemilu, maka kita tinggal berharap pemimpin yang baru bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Pemilu itu sudah biasa, yang terpilih menjadi pemimpin kita tinggal harapkan beliau-beliau bisa bekerja dengan baik dan pemerintah bisa melayani masyarakatnya secara lancar," terang alumni Akmil 1993.

Mayjen Fajar mengingatkan sesuai Butir-butir Pancasila, demokrasi kita adalah musyawarah untuk menghasilkan kemufakatan.

"Kita sesuai butir-butir Pancasila harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan bukan untuk mengutamakan demo untuk mufakat," tambahnya.

Mantan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Potan) Kementerian Pertahanan ini menjelaskan secara umum masyarakatnya sudah cerdas, hingga situasi berlangsung kondusif.

"Masyarakat di wilayah Kodam III Siliwangi sudah sangat cerdas, terutama di bidang pendidikan politik hingga walaupun Pemilu ada yang menang dan kalah, situasi tetap berlangsung kondusif," jelas Mayjen Mohammad Fadjar. ● **gio**

# 8 | Nusantara

IDN/ANTARA



### EVAKUASI IMIGRAN ROHINGYA DI PERAIRAN SAMUDERA HINDIA

Personel Basarnas bersama TNI AL dan Polairud Polda Aceh mengevakuasi imigran etnis Rohingya yang terombang-ambing di perairan laut Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Kamis (21/3). Sebanyak 69 pengungsi Rohingya yang terdiri 45 laki-laki dan 24 perempuan dievakuasi ke daratan setelah kapal yang mereka tumpangi terbalik sekitar 15 mil di perairan Samudra Hindia.

### TINJAU JEMBATAN RAWAYAN DI CIBINONG

# Pangdam Siliwangi: Pembangunan Jembatan Rawayan akan Diteruskan

Pembangunan jembatan rawayan ini Insya Alah akan dilanjutkan lagi di lokasi lain yang masyarakatnya membutuhkan jembatan rawayan. Program pembangunan seperti ini bisa menjadi role model atau percontohan kabupaten maupun kota lainnya di wilayah Kodam III Siliwangi, kata Pangdam Kodam III Siliwangi, Mayjen Mohammad Fadjar.

**CIBINONG (IM)** - Didampingi Komandan Korem 061 Surya Kencana

Komandan Kodim 0621 dan Penjabat Bupati Bogor, Pangdam Kodam III Sili-

wangi, Mayjen Mohammad Fadjar meninjau jembatan rawayan di Kampung Kedung Umpal, Kelurahan Keradenan, Cibinong.

Mayjen Mohammad Fadjar mengatakan bahwa jembatan rawayan yang dibangun masyarakat bersama Kodim 0621 Kabupaten Bogor maupun Korem 061 Surya Kencana harus dirawat oleh masyarakat.

"Jembatan rawayan ini usai diresmikan pada Bulan November Tahun 2023 lalu oleh Bupati Bogor, pengeloannya diserahkan ke masyarakat, jembatan ini harus

dirawat dan bukan lagi tanggung jawab Pemkab Bogor," kata Mayjen Mohammad Fadjar, Kamis (21/3).

Jendral 'berdarah' Kopasus ini menuturkannya untuk perawatan jembatan ini, Ketua RW bisa menghimpun secara swadaya dari masyarakat yang menggunakan jembatan rawayan.

"Biaya perawatan jembatan rawayan yang menghubungkan warga Desa Kedung Waringin, Bojonggede dengan warga Kelurahan Keradenan, Cibinong ini bisa dihimpun secara swadaya oleh Ketua RW, yang terpenting jangan dikenakan tarif, lalu dana yang terhimpun untuk mengecat jembatan dan lainnya hingga usia pakai jembatan bisa lebih panjang," tuturnya.

Ia menjelaskan karena bermanfaat secara baik oleh masyarakat, maka program pembangunan

jembatan rawayan yang merupakan kerja sama Pemkab Bogor bersama Kodam III Siliwangi dan jajaran akan dilanjutkan.

"Pembangunan jembatan rawayan ini Insya Alah akan dilanjutkan lagi di lokasi lain yang masyarakatnya membutuhkan jembatan rawayan," jelasnya.

Alumni Akmil Tahun 1993 ini melanjutkan program pembangunan seperti ini bisa menjadi role model atau percontohan kabupaten maupun kota lainnya di wilayah Kodam III Siliwangi.

"Pembangunan jembatan rawayan ini dan lainnya yang bermanfaat buat masyarakat bisa menjadi percontohan, di kota maupun kabupaten lainnya, baik di Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Banten," lanjut Mayjen Mohammad Fadjar. ● **gio**

## Petugas Terminal Baranangsiang Siap Tindak Bus yang Bunyikan Klakson Telolet

**BOGOR (IM)** - Terminal tipe A Baranangsiang melarang bus membunyikan klakson telolet di dalam lingkungan terminal Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur. Hal ini dilakukan untuk keselamatan pengguna terminal maupun anak-anak di bawah umur yang tertarik dengan bunyi klakson telolet.

Terlebih saat ini sudah ada imbauan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenuh), agar seluruh operator bus tidak lagi menggunakan klakson telolet.

Kepala Terminal Tipe A Baranangsiang, Moses Liba Ary memaparkan, kebijakan di terminal Baranangsiang untuk bus AKAP dan AKDP yang menggunakan klakson di luar aturan semestinya pihaknya dengan tegas melarang.

"Yang kami takutkan itu bila suara yang disebut telolet itu mengundang

anak-anak di bawah umur. Terminal Baranangsiang itu bukan taman bermain yang didatangi mereka (anak-anak di bawah umur-red), di dalam terminal itu ada bus-bus besar yang memungkinkan membahayakan anak-anak kecil itu," ungkap Moses, Kamis (21/3).

Moses menegaskan, pihaknya sudah lama sekali memberlakukan larangan itu dan sampai saat ini tidak ada yang membunyikannya di dalam terminal.

"Dahulu sempat ada yang membunyikan klakson telolet, petugas kami langsung mengejar bus tersebut untuk diberikan peringatan. Kami melarang sopir bus yang membunyikan ketika masuk maupun keluar terminal. Alhamdulillah tidak ada lagi yang membunyikan, karena kami melarang tegas," tegas Moses.

Moses menjelaskan, bunyi klakson itu mengundang

dari sekitar terminal. Sanksinya akan menahan surat sementara dan memberikan pemahaman.

"Kalau masih membandel kami melarang bus tersebut masuk dalam terminal. Ini bukan peraturan, tapi ini tindakan kami karena memancing anak dibawah umur yang bisa membahayakan dan memang anak-anak kecil itu ada datang ke terminal Baranangsiang," jelasnya.

Terpisah, Direktur Sarana Transportasi Jalan pada Kemenuh, Danto Restyawan memaparkan, penggunaan klakson telolet dapat menyebabkan kebiasaan pasokan udara atau angin sehingga berdampak pada kinerja rem kendaraan yang kurang optimal, serta berpotensi menimbulkan kecelakaan. Hal ini juga sejalan dengan hasil rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). ● **gio**



IDN/ANTARA

### GEDUNG CAGAR BUDAYA PLN DI BANDUNG

Suasana Gedung Kantor PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat di Jalan Cikapundung, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/3). Gedung PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat yang dibangun pada tahun 1933 dan diarsiteki oleh C. P. W. Shoemaker tersebut termasuk dalam daftar cagar budaya dengan perawatan secara berkala untuk menjaga kelestarian gedung yang masih banyak menyimpan peninggalan zaman penjajahan Belanda.

## AKAN UNDANG KADIN HINGGA APINDO DPRD Jabar Siap Tindak Lanjut Soal Upah Buruh

**BANDUNG (IM)** - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) segera menindaklanjuti tuntutan penerbitan Keputusan Gubernur (Kepgub) yang mengatur upah bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya sudah 1 tahun atau lebih.

Yakni, dengan mengundang, dan mempertemukan para buruh dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia.

"Tadi dari diskusi yang berkembang, DPRD Jawa Barat siap menindaklanjuti (masalah upah buruh) dengan mengundang Kadin, Apindo dan beberapa lembaga serta asosiasi terkait," ujar Achmad Ru'yat, Kota Bandung, Kamis (21/3).

Menurutnya, pertemuan dengan Kadin, Apindo, asosiasi hingga lembaga terkait bersama buruh tersebut untuk melakukan dengar pendapat terkait Kepgub yang mengatur upah bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya sudah 1 tahun.

Seperti, tuntutan dari para buruh.

"Dengar pendapat apa yang menjadi harapan dari teman-teman serikat buruh dan apa yang menjadi keinginan para pengusaha atau pengusaha yang tergabung dalam asosiasi," katanya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey

Machmudin menegaskan tidak bisa mengubah keputusan sebelumnya yakni, tetap tidak akan mengeluarkan Kepgub yang mengatur upah bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya sudah 1 tahun atau lebih.

Hal itu karena alasan statusnya sebagai Pj dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membatasi untuk mengeluarkan kebijakan, satu di antaranya soal Kepgub yang mengatur upah bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya sudah 1 tahun atau lebih.

"Saya ASN yang terikat dengan aturan, jadi saya tak bisa mengeluarkan Kepgub (yang mengatur upah bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya sudah 1 tahun atau lebih)," kata Bey Machmudin.

Namun, kata dia, pihaknya akan mengkaji soal aturan mengeluarkan Kepgub yang mengatur upah bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya sudah 1 tahun atau lebih.

Sebagaimana dorongan dari DPRD Jabar.

Terlepas dari hal tersebut, pihaknya sangat mengapresiasi inisiasi DPRD Jawa Barat yang telah memfasilitasi audiensi bersama serikat buruh. Termasuk adanya dorongan dari DPRD Jawa Barat untuk melakukan penelaahan terkait penerbitan Kepgub yang mengatur upah buruh di atas satu tahun. ● **pra**